

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Karya

Dewasa ini, berita atau informasi tidak harus diakses melalui radio, koran, dan televisi, tetapi dalam format lain, seperti dokumenter (Ayawaila, 2017). Karya dokumenter adalah film yang menyajikan peristiwa nyata dengan keahlian kreator dalam merangkai gambar-gambar menarik sehingga membentuk sebuah karya yang istimewa secara menyeluruh (Fachruddin, 2017). Ayawaila (2017) menyatakan bahwa istilah "dokumenter" pertama kali dipopulerkan oleh John Grierson ketika mengulas film *Moana* karya Robert Flaherty. Menurut Grierson, film dokumenter adalah sebuah laporan aktual yang disajikan secara kreatif. Ayawaila (2017) mengatakan bahwa film dokumenter juga menjadi salah satu format yang sering digunakan untuk program siaran televisi. Ia menjelaskan bahwa format tersebut adalah perkembangan dari lima kategori program jurnalistik seperti esai berita aktual, *feature*, *magazine*, dokumenter televisi dan dokumenter seri televisi.

Dari tiga definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa program dokumenter adalah karya yang menyajikan peristiwa aktual dengan kreatif sehingga dapat disajikan dengan menarik. Nichols (2017), menyatakan bahwa dokumenter berdiri untuk mewakili pandangan kelompok, institusi, bahkan individu. Ia juga menambahkan kalau dokumenter juga menyampaikan kesan, keinginan, cerita, argumen, bahkan memberikan perspektif mereka sendiri (Narasumber) dengan tujuan membujuk kita untuk menerima pandangan mereka. Selain itu, film dokumenter juga berperan penting dalam memicu diskusi dan membentuk wacana publik (Irawanto & Octastefani, 2019). Menurut Irawanto dan Octastefani (2019), hal ini dikarenakan film dokumenter memiliki kemampuan unik untuk menyajikan isu-isu sosial dan politik yang rumit dalam bentuk audio-visual yang mudah dipahami. Terlebih lagi, film dokumenter berdurasi panjang sehingga dapat

mengupas permasalahan secara lebih mendalam, sehingga menjadi landasan yang kuat untuk dialog dan pencarian solusi atas isu-isu yang diangkat.

Oleh karena itu, penulis akan menggunakan format dokumenter sebagai produk akhir karya ini. Ditambah, film dokumenter memiliki daya tarik yang signifikan karena mampu mengintegrasikan unsur jurnalisme dengan sinematografi yang estetik (Gurning et al., 2024).

Berlandas dari definisi dan penjelasan mengenai dokumenter tersebut, penulis berencana untuk menggunakan format video dokumenter sebagai medium program yang akan menaungi topik penulis. Penulis akan mengangkat topik mengenai perjuangan guru honorer yang belum sejahtera dan harus melewati medan ekstrim untuk mengajar di sekolah. Ide topik ini berangkat dari maraknya berita mengenai guru honorer yang masih memiliki gaji di bawah Upah Standar Minimum (UMK) dan harus mengadu nyawa untuk mengajar.



Sumber: Laman IDEAS: Survei IDEAS: 74 Persen Guru Honorer dibayar Lebih Kecil dari Upah Minimum Terendah Indonesia

Gambar 1. 1 Data Profil Kesejahteraan Guru Indonesia

Di Indonesia, kesejahteraan guru masih jauh dari kata layak. Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) melakukan survei terhadap “Kesejahteraan Guru” pada 2024 menunjukkan setidaknya 74% guru di Indonesia memiliki gaji di bawah upah minimum, yakni Rp2.000.000 atau kurang. Situasi ini secara tidak langsung menyatakan bahwa guru di Indonesia sama sekali belum sejahtera. Sebagai gambaran, kota yang memiliki upah minimum terendah di Indonesia adalah Jawa Tengah dengan nominal 2.036.947 (Kedaton, 2024). Kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan tenaga pendidik. Jika kesejahteraan tersebut tidak tercapai, kemungkinan besar, seorang guru akan menghadapi tantangan dalam memberikan pengajaran yang maksimal akibat kurangnya motivasi (Aulia et al., 2023). Oleh karena itu, masalah kurangnya kesejahteraan yang dialami oleh guru bukan hanya masalah individu, tetapi akhirnya dapat berdampak langsung pada kualitas pendidikan di Indonesia.

Hal ini dapat berdampak kepada masa depan generasi yang diajar karena kesejahteraan guru merupakan masalah yang memengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia (Fatria et al., 2022). Menurut Fatria dkk, jika kesejahteraan guru tidak terpenuhi, kemungkinan besar guru akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran yang optimal bagi siswa. Sebab, kesejahteraan tersebut dapat memotivasi guru untuk memaparkan ilmu dengan lebih efektif sehingga siswa dapat menerima pelajaran dengan baik dan otomatis meningkatkan kualitas pendidikan bagi siswa. Oleh karena itu, untuk mencapai kemajuan suatu bangsa, penting untuk memastikan kesejahteraan guru karena pendidikan yang berkualitas menjadi fondasi utama dalam membentuk generasi yang cerdas.

Pendidikan merupakan aspek fundamental dalam kemajuan suatu bangsa, terutama dengan adanya peran penting guru sebagai tenaga pendidik (Adiatma et al., 2023). Sementara itu, Patel (2018) menyatakan bahwa guru memiliki peran yang sangat penting dalam membangun bangsa karena masa depan sepenuhnya berada di tangan mereka. Ia memberikan umpama bahwa dunia tanpa guru hanyalah kekacauan, di mana tidak ada yang bertanggung jawab untuk memastikan anak-

anak mendapatkan pendidikan terbaik dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan yang baik dan sehat.

Guru berperan penting dalam mempersiapkan anak-anak untuk tanggung jawab masa depan mereka sehingga dengan pendidikan yang optimal, kebijaksanaan, pengalaman, dan akses terhadap sumber daya yang memadai, guru dapat membangun masa depan bangsa secara bertahap (Patel, 2018). Menurut Adiatma (2023), di Indonesia sendiri, proses pembelajaran yang ideal masih belum sepenuhnya terlaksana, bahkan sering kali terjadi berbagai masalah di dunia pendidikan. Banyak sekolah yang tidak dapat menjalankan proses pembelajaran dengan optimal akibat kurangnya infrastruktur, keterbatasan sarana pendukung, serta rendahnya minat siswa dalam mengikuti kegiatan belajar. Oleh karena itu, peran guru, baik honorer maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS), harus diperhatikan, karena keduanya menghadapi tantangan dan kondisi kesejahteraan yang berbeda.

Guru honorer sendiri merujuk pada guru yang diangkat oleh pihak sekolah, tetapi belum memiliki kepastian terkait tugas dan gaji yang diterima (Imananda & Hendriani, 2020). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2005,

Tenaga honorer diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lainnya dalam pemerintahan untuk menjalankan tugas tertentu. Penghasilan tenaga honorer menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dengan kata lain, banyak guru honorer yang tidak menerima kelayakan gaji, karena penghasilan yang diberikan bersifat tidak tetap dan bergantung pada keputusan pihak sekolah. Oleh karena itu, pihak sekolah tidak memiliki kewajiban untuk memberikan nominal gaji tertentu terhadap guru honorer.

Berbalik dengan itu, guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) justru mendapatkan gaji tetap beserta tunjangannya. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 43 Tahun 1999,

Pegawai Negeri adalah warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, dan diberi tugas dalam suatu jabatan negeri atau tugas negara lainnya, serta digaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain menerima gaji pokok, guru PNS juga berhak atas berbagai jenis tunjangan seperti tunjangan fungsional, tunjangan untuk istri, tunjangan beras, dan tunjangan anak (Sa'adah et al., 2019). Sa'adah dkk menambahkan bahwa guru PNS juga dapat memperoleh insentif yang berasal dari pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota. melihat dari kondisi tersebut, guru honorer sering kali harus bertahan dengan gaji yang jauh lebih kecil, tanpa jaminan kesejahteraan yang setara dengan guru PNS.

Salah satu masalah guru di Indonesia yang selalu menjadi sorotan adalah persoalan gaji. Menurut Adiatma dkk (2023), guru yang saat ini memiliki gaji tertinggi adalah guru PNS bahkan, jika dibandingkan dengan guru Non-PNS atau guru Honorer, selisih gajinya sangat besar. Ia juga menjelaskan bahwa saat ini masih ada guru honorer di Indonesia yang menerima gaji hanya sebesar Rp 150.000. Hal ini dialami juga oleh Asyari, salah satu guru honorer yang kisahnya diangkat ke artikel *Project Multatuli* berjudul [“Beban Guru Honorer Surabaya: Satu Minggu Digaji, Tiga Minggunya Pengabdian”](#) yang ditulis oleh Inez Kriya (2024). Asyari adalah salah satu guru honorer yang bekerja di sekolah swasta dan hanya digaji satu minggu untuk satu bulan kerja. Menurut artikel, Asyari hanya digaji satu minggu untuk empat minggu pengabdian. Ia digaji berdasarkan jumlah Jam Pelajaran (JP) yang diajar. Untuk setiap JP, Asyari dibayar kurang dari 50.000 rupiah. Namun, JP yang didapatkan Asyari setiap semesternya tidak menentu sehingga memengaruhi penghasilannya sebagai guru honorer. Lebih parahnya lagi, dengan gaji yang terbatas, Asyari juga hanya digaji selama satu minggu yang seharusnya empat minggu (Kriya, 2024).

Di Indonesia, isu terkait guru selalu menjadi fokus utama para ahli pendidikan. Mereka menemukan setidaknya tiga masalah yang dihadapi oleh guru di Indonesia, yakni kualitas guru, kesejahteraan guru, dan politisasi guru (Sulisworo et al., 2017). Menurut Adiatma (2023), Gaji guru yang rendah juga dapat memberikan dampak signifikan pada kesejahteraan guru bahkan, memengaruhi berbagai aspek kehidupan mereka. ia menjelaskan bahwa gaji yang tidak memadai

dapat menyebabkan guru kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal, serta mengurangi akses mereka ke layanan kesehatan karena kesulitan membayar. Keterbatasan finansial ini juga memaksa beberapa guru untuk mengambil pekerjaan sampingan, sehingga mengurangi fokus mereka pada proses mengajar (Adiatma et al., 2023). Selain itu, gaji yang rendah berkontribusi pada penurunan status sosial guru di masyarakat, serta menyulitkan mereka dalam membiayai pendidikan anak-anak, yang dapat mempengaruhi masa depan generasi penerus (Adiatma et al., 2023).

Selain itu, masih banyak juga guru yang harus mempertaruhkan nyawa untuk bisa mengajar di sekolah terpencil. Oleh sebab itu, perlindungan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan karena memberikan jaminan keselamatan, kesehatan, dan keamanan dalam setiap aktivitas (Nanang et al., 2022). Salah satu yang harus mengalami hal tersebut adalah guru-guru di Sukabumi, Jawa Barat yang harus menyusuri sungai dengan perahu untuk mengajar di sekolah. Dilansir dari artikel *Detik.com* berjudul [“9 Guru di Sukabumi Bertaruh Nyawa Naik Perahu Bocor demi Mengajar”](#) yang ditulis oleh Syahdan Alamsyah, terdapat total 14 guru dari SMPN 4 Cibitung dan SDN Ciloma yang harus menaiki perahu setiap hari melalui Sungai Cikaso selama 45 menit karena tidak ada jalur darat yang tersedia. Dalam video yang terlampir di artikel, dapat terlihat bahwa perahu sudah mengalami kebocoran dan guru-guru harus menyerok air yang masuk ke dalam perahu. Menurut salah satu guru, perahu tersebut sudah lapuk karena dibuat pada 2019 dan belum ada penggantinya (Alamsyah, 2024).

Berdasarkan topik mengenai perjuangan guru honorer yang belum sejahtera dan harus melewati medan ekstrim untuk mengajar di sekolah ini, penulis memutuskan untuk menggunakan program dokumenter sebagai *output* pembuatan skripsi berbasis karya. Keputusan ini diambil karena format dokumenter memiliki daya tarik yang cukup kuat dengan mengolaborasikan unsur jurnalisme dan sinematografi sehingga, dapat menjadi pilihan menarik bagi masyarakat (Gurning et al., 2024). Selain itu, menurut Aufderheide & Woods (2021) Produksi film

dokumenter juga sudah meningkat secara drastis dalam tiga dekade terakhir. hal ini didorong oleh pertumbuhan produksi dari penyedia konten seperti *Discovery*, *National Geographic*, Amazon, Netflix, Hulu, dan berbagai penyedia konten khusus lainnya. Peningkatan yang sama juga terjadi pada Program non-fiksi di televisi (Aufderheide & Woods, 2021). Oleh karena itu, dokumenter dirasa dapat memberikan pemahaman mendalam serta meningkatkan kesadaran publik terhadap isu-isu melalui pendekatan audio dan visual. Hal ini juga menjadi kelebihan bagi penulis, karena penulis akan mengunggah karya ke platform media *streaming*, Youtube *KompasTV*. Media Youtube menjadi pilihan penulis karena format ini mudah diakses oleh khalayak luas dan menawarkan biaya produksi serta distribusi yang relatif terjangkau, sehingga menjadi pilihan yang efektif dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat (Gurning et al., 2024).

Program dokumenter ini akan menggunakan jenis *participatory* di mana penulis akan terjun langsung ke lapangan dan terlibat dalam proses wawancara dan kegiatan narasumber. Menurut Nichols (2017), Dokumenter *participatory* merupakan jenis dokumenter yang berfokus pada interaksi antara pembuat film dengan subjek/narasumber. Jenis dokumenter ini lebih mempertegas keterlibatan langsung dengan subjek/narasumber seperti percakapan atau provokasi. Penulis akan menambahkan elemen lain seperti *voice over*, atau ilustrasi data tetapi tetap mempertahankan unsur *participatory* sehingga elemen-elemen tersebut hanya menjadi pelengkap saja.

Seri Program dokumenter “Pilar Pengabdian” Episode “Bahtera Ilmu” diharapkan dapat menyuarakan keadilan bagi guru honorer yang belum sejahtera dan meningkatkan kesadaran pemerintah untuk menyejahterakan guru honorer. Program dokumenter ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran (*Awareness*) masyarakat bahwa masih banyak guru honorer di Indonesia yang diberi upah tidak layak dan harus berjuang untuk mengajar.

1.2 Tujuan Karya

Adapun pembuatan karya program TV dokumenter “Pilar Pengabdian” Episode “Bahtera Ilmu” memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai. Berikut adalah rinciannya.

- a. Menginformasikan khalayak terhadap kenyataan situasi pendidikan di Indonesia.
- b. Menghasilkan produk jurnalistik yang dapat ditonton secara *on demand*, melalui medium Youtube *KompasTV* dengan target 1000 penonton..
- c. Menghasilkan produk jurnalistik yang dapat menyuarakan ketidakadilan terhadap pendidik dan tenaga pendidik.

1.3 Kegunaan Karya

Karya program TV dokumenter “Pilar Pengabdian” Episode “Bahtera Ilmu” Memiliki beberapa kegunaan. Berikut adalah rinciannya.

- a. Menjadi karya jurnalistik berbentuk program TV yang mendalami isu-isu tenaga pendidik yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.
- b. Menjadi referensi program TV dokumenter yang mengangkat isu mengenai pendidikan.
- c. Meningkatkan kepedulian masyarakat mengenai pendidik dan tenaga pendidik yang masih belum sejahtera.
- d. Menjadi perantara bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem pendidik dan tenaga pendidik dan membuat kebijakan baru yang menyejahterakan pendidik dan tenaga pendidik.